

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD KOTA PALOPO

Sulisda Parinding*, Nispa Sari, Rifqa Ayu Dasila

Afiliasi:

Program Studi
Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis
Universitas
Muhammadiyah Palopo

Proses Artikel:

Received: 11-02-2023
Revised: 24-02-2023
Accepted: 27-02-2023

***Korespondensi:**

sulisda01@gmail.com

DOI :

<http://dx.doi.org/10.30813/jab.v16i1.4198>

Abstrak

Latar Belakang: Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern.

Tujuan: untuk melihat apakah standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan sistem pengendalian intern, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Dengan jumlah sampel 51, populasi penelitian ini adalah pegawai SKPD Kota Palopo. Metode analisa data menggunakan uji valisitas dan regression, uji asumsi klasik dan hipotesa-t. Pengumpulan data dilakukan melalui primer terutama penyebaran koesioner lansung kepada responden.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, sistem pengendalian intern memiliki dampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Merupakan penelitian yang meneliti tentang kualitas laporan keuangan SKPD Kota Palopo

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern

Pendahuluan

Organisasi sektor publik di Indonesia baik dipusat maupun di daerah dalam meningkatkan kewajiban serta pertanggungjawaban dalam menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah daerah secara periodik, tepat waktu, dan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah dirubah dan diganti menjadi peraturan Republik Indonesia No 71 dan peraturan menteri dalam negeri No 64 Tahun 2013. Sistem pemerintah di negara indonesia telah mengalami perubahan sistem dari sentralisasi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia menganut sistem sentralisasi yang memusatkan seluruh kewenangan yang berada ditangan pemerintah pusat. Menurut (Kusaeri et al., 2022), akuntansi sektor publik adalah kegiatan akuntansi untuk peristiwa dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. karena organisasi sektor publik yang terpenting adalah pemerintah.

Beberapa tahun terakhir telah terlihat adopsi signifikan berbasis akrual oleh beberapa perusahaan sektor publik di negara-negara berkembang, termasuk dengan disetujuinya PP Nomor 71 tahun 2010, yang

mengamanatkan organisasi sektor publik baik pusat maupun daerah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual (Putra & Varina, 2021). Organisasi sektor publik di Indonesia secara formal menganut akuntansi akrual sejak 1 Januari 2015. Sebagai organisasi sektor publik yang menjadi fasilitator juga harus menerapkan basis akrual pada kualitas laporan keuangannya.

Namun, beberapa literatur akademik berpendapat bahwa jika akuntansi akrual dimasukkan dalam laporan keuangan sektor publik, diperlukan penelitian lebih lanjut. Apakah sistem akrual benar-benar sesuai untuk perusahaan sektor publik menjadi dasar kesepakatan. Persyaratan pendaftaran akun khusus untuk organisasi sektor publik yang tidak berlaku untuk organisasi sektor swasta (misalnya aset bersejarah/warisan, infrastruktur aset, dana modal, dll). Hal ini dapat menunjukkan bahwa pandangan dasar akuntansi akrual sebagai solusi yang terbukti dengan sendirinya dan praktis untuk perusahaan sektor publik berdasarkan asumsi yang terlalu mendasar dari fitur yang sama dengan sektor swasta (Kawedar, 2017). Ada beberapa pihak yang terlibat, sehingga jika penerapan akuntansi sektor publik menimbulkan ambiguitas teknis.

Pada tahun 2021, jumlah celah Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di berbagai unit akan dirangkum menjadi 535 Lembaga Pemeriksa Halal (LHP), meliputi 3 LHP keuangan, 317 LHP kinerja, dan 215 LHP DTT. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021, BPK mengungkapkan 4.555 hasil survei yang terdiri dari 6.011 pertanyaan. Sebanyak 53 persen atau 3.173 isu terkait inefisiensi, inefisiensi dan inefektivitas, diikuti 29 persen atau 1.720 isu terkait ketidakpatuhan dan 18 persen atau 1.118 isu terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Sumber data IHPS II 2021 (BOGOR, 2022).

Permendagri No. 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang merupakan pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban APBD mulai dari proses pendataan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Apabila sistem akuntansi tidak diterapkan dengan baik, maka penyusunan laporan keuangan akan terhambat sebagaimana tersebut di atas, sehingga diperlukan penerapan sistem akuntansi yang baru yaitu penerapan sistem akuntansi akrual yang mengakui pengaruh transaksi dan hal-hal lain pada saat itu. transaksi dan peristiwa, terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima (Nyoman Triyadi. Rasmini, 2016).

Selain itu, sistem pengendalian intern pemerintah juga merupakan sistem yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Bukti di bidang ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah menempati urutan teratas dalam daftar audit yang dilakukan oleh BPK dan lainnya. BPK sebagai auditor eksternal selalu menguji keandalan sistem pengendalian intern ini dalam setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan sejauh mana pengujian yang akan dilakukan. Lemahnya sistem

pengendalian internal pemerintah yang memberikan peluang besar terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD), menuai banyak kritik dari regulator.

Saat ini beberapa perangkat daerah berada di palopo sudah tidak efektif keberadaannya, beberapa SKPD tersebut sebaiknya dilebur kembali ke perangkat daerah sebelumnya, selain itu dengan mengurangi jumlahnya akan membuat efisiensi anggaran. Pemkot palopo menyatakan bahwa jika tidak dilakukan perampingan jumlah SKPD maka secara otomatis berdampak pada anggaran belanja publik yang lebih besar. Dibandingkan pengawai, anggaran yang minim, sehingga perangkat daerah tidak berbuat apa-apa, dan beberapa perangkat daerah ini mampu mendongkrak PAD dan membuat program yang dirasakan masyarakat luas palopo.(Rewa, 2019).

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, dan pengakuan laporan penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam pelaksanaannya anggaran didasarkan pada dasar yang tercantum dalam APBN/APBD (Langelo et al., 2015). Akuntansi akrual adalah sistem yang mengakui dan mencatat transaksi saat terjadi, atau saat akuisisi dilakukan. Dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi khusus ini berfokus pada ekonomi akuntansi untuk sumber daya ekonomi suatu entitas, lembaga, atau lembaga. Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik, pengaturan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan menjadi penting Menurut (Anita Sari, 2022). (Yeni et al., 2020) menyatakan bahwa Menunjukkan standar akuntansi sebagai pedoman atau prinsip yang memandu perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang dimaksudkan untuk dilaporkan kepada pengguna laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah program yang bertanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilakukan dan mengambil keputusan bagi pengguna laporan keuangan daerah mulai dari pendataan, pencatatan ikhtisar dan proses pelaporan keuangan,(suryo triono, 2020). Kualitas pelaporan keuangan pemerintah sangat erat kaitannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena pelaporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan pedoman dan aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku ((Puspita et al., 2021).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jadi SAP secara langsung merupakan persyaratan yang berkekuatan hukum dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerinta

(Otonomi & Daerah, 2013). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan basis akrual. Dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Accrual Basis, tercipta laporan keuangan yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami sehingga mampu memberikan gambaran lengkap tentang posisi keuangan serta menyajikan fakta yang relevan, andal, dan benar tentang hak dan kewajiban. informasi dan membantu menilai kinerja keuangan pemerintah, (Ikhyanuddin et al., 2022).

H_1 : Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intren Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern merupakan strategi yang mencakup teknik dan alat terkoordinasi yang digunakan dalam struktur organisasi dan bisnis untuk menjaga keamanan aset perusahaan untuk memverifikasi keakuratan dan kebenaran akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan membantu mendorong kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen yang telah ditetapkan (Hasanah et al., 2021). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 . Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan memadai atas tercapainya tujuan organisasi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, (Dadang, 2017). Sistem Kontrol Pemerintah, juga dikenal sebagai SPIP, adalah sistem kontrol yang menyediakan magang secara kolektif di pemerintah federal dan kota. Sistem pengendalian intern sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, sehingga pemerintah memperkuat pelaksanaan sistem pengendalian intern, dan pemerintah juga harus mengkaji ulang sistem pengendalian intern yang diterapkan pemerintah karena akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan.

H_2 : Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian internal terhadap laporan keuangan diperlukan untuk menciptakan informasi laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya serta untuk mencegah berbagai masalah yang mungkin terjadi dari pengawasan dan pengendalian yang tidak memadai. (Maulana, 2020) menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah merupakan hasil dari proses identifikasi, pengukuran,

pencatatan, dan transaksi ekonomi (keuangan) dari kepentingan akuntansi pemerintah daerah yang ada yang digunakan sebagai entitas akuntansi informasi dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan. dan keputusan ekonomi yang dibuat oleh pihak -pihak yang membutuhkan. Pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi dapat diperoleh jika disusun sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern adalah cara untuk mengarahkan, memantau dan mengukur sumber daya organisasi, dan juga memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi, Menurut (Rahmawati et al., 2018). Laporan keuangan yang berkualitas tinggi dapat dikatakan sangat baik jika memberikan informasi laporan keuangan yang dapat dipahami, memadai bagi pengambilan keputusan pengguna, bebas dari konotasi yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan ((Ikriyati & Aprila, 2019).

H_3 : Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan sekaligus.

Metode Penelitian

Pengujian data yang digunakan software statistik SPSS 2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan prosedur statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Selanjutnya digunakan metode lanjutan interval untuk membagi jawaban responden yang berupa data ordinal ke dalam interval. Sebelumnya, pernyataan dalam kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya untuk menentukan apakah mereka mengukur variabel yang dijelaskan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih bermanfaat, jelas dan mudah dipahami. Kemudian pengujian selanjutnya adalah pengujian hipotesis klasik. Beberapa uji dilakukan untuk menguji hipotesis, diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas dan yang terakhir pengujian hipotesa-t. Selain itu, indikator-indikator digunakan setiap variabel antara lain: variabel standar akuntansi pemerintah (SAP) diukur dengan 3 indikator yaitu: penerapan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas, penerapan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta penyajian secara wajar, indikator yang digunakan dalam sistem pengendalian intern (SPIP) meliputi atribut-atribut dokumentasi, kesadaran/pemahaman, sikap dan tindakan prosedur pengendalian, serta monitoring, (Bpkp, 2012). dan kualitas laporan keuangan memiliki kriteria indikator yaitu: kesesuaian dengan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern,(Safitri & Zulkarnain, 2021)

Tanpa membuat asumsi yang luas, metode deskriptif mempelajari data dengan menggambarannya atau apa yang dikumpulkan. Variabel adalah ciri yang akan diamati dari suatu pengamatan. Data penelitian yang digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (variabel X1), Sistem Pengendalian Intern (SPIP) (variabel X2) dan kualitas pelaporan keuangan dengan menggunakan data sekuensial (variabel Y). Alat ukur yang digunakan untuk menentukan standar akuntansi pemerintahan (SAP (variabel x1), sistem pengendalian intern (SPIP) (variabel X2) dan kualitas pelaporan keuangan (variabel Y) menggunakan teknik skala Likert. Skala Likert adalah metode pengukuran sikap dengan menggunakan kesepakatan atau ketidaksetujuan dengan topik, objek, atau peristiwa tertentu. Metode skala Likert menggunakan kata-kata untuk menunjukkan tanggapan positif hingga negatif yang kuat. Skala ini dapat ditemukan dari 5-4-3-2-1, yang merupakan skor yang digunakan untuk respon kuantitatif. Selain skor numerik, orang dapat menggunakan kata-kata untuk menjawab setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Sumber data penelitian yang digunakan dalam hal cara memperolehnya adalah data mentah, yaitu data yang diolah langsung dari subjek. Untuk bendungan penelitian, kewenangan dan keuangan pemerintah daerah kita adalah Palopo.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam bagian akuntansi pada SKPD kota palopo sebanyak 3 kantor. Setiap kantor diwakili 3 bagian sub keuangan, bendahara dan staff keuangan, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 orang dari seluruh bagian keuangan SKPD Kota Palopo.

Hasil dan Pembahasan

Deskriptip statistik

Uji reabilitas

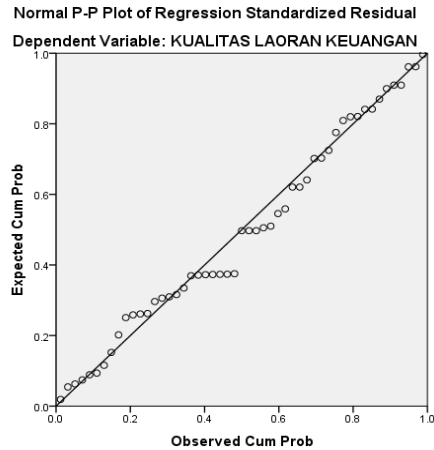
Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode statistik Crinback Alpha dengan signifikansi 0,60, jika pernyataan yang disampaikan dalam pengukuran instrumental cukup reliabilitas. Sebaliknya, jika nilai Cronback Alpha kurang dari 0,60, klaim tersebut tidak dapat diandalkan. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. hasil uji realibitas

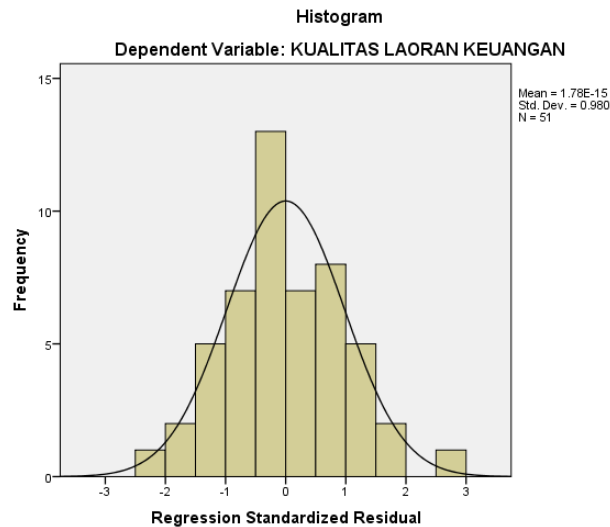
No	Variabel	Cronbach Alpha	Hasil
1	Standar Akuntansi Pemerintah (X)	0,843	Reliabel
2	Sistem Pengendalian intren (X)	0,809	Reliabel
3	Kualitas laporan keuangan (Y)	0,962	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah di SPSS

Uji Asumsi Klasik



Gambar 1 hasil uji normalistis



Gambar 2. Hasil uji histogram

Pada gambar grafik di atas sebaran data (titik) pada sumbu diagonal membentuk garis diagonal sesuai dengan pedoman uji normalitas, hal ini menunjukkan bahwa jika sebaran data (titik) mengikuti atau mendekati garis tersebut maka penelitian dapat dilakukan atau dikatakan normal. Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini tampak normal, tes dilakukan dengan menggunakan metode Colologrov Smimov..

Tabel 2. Hasil Uji Normalistis

One-Sample Kolmogorov-Smimov	
Test Statistic	P-Value
N	51
One-Sample Kolomogorov Smimov	,839

Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS

Dari hasil uji normalitas dengan metode Kolomogrov-Smimov diperoleh hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,839, dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini berdistribusi normal

Uji multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Variabel	VIF	Torelance
Pengaruh standar akuntansi pemerintah (X1)	1.020	0,980
Sistem pengendalian intren (X2)	1.020	0,980
Kualitas laporan keuangan (Y)	1.020	0,980

Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS

Pada Tabel 3 terlihat nilai toleransi sebesar 0,984 untuk variabel bebas.Sedangkan untuk nilai VIF 1,020 berdasarkan pedoman uji multikolinearitas, nilai tolerance > 0,1, dan untuk nilai VIF < 10 maka dapat dilihat bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi.

Berdasarkan tabel 4, nilai signifikansi variabel SAP (X1) adalah $0,000 < 0,05$, nilai hasil tersebut dapat diartikan menolak H0, menerima H1, artinya variabel SAP berpengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan. Meskipun signifikansi variabel SPIP (X2) sebesar $0,978 > 0,05$, namun hasil menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti variabel SPIP tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengujian hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 4. Hasil uji parsial

Model	Unstandardized Coefficients		stabdardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (constant)	-12.804	15.872		-807	.424
SAP	1.114	.228	.581	4.895	.000
SPIP	.007	.265	.003	.028	.978

sumber: Data Primer yang diolah di SPSS

Uji Simultan (Uji-F)

Tabel 5. Hasil uji simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean squares	F	Sig.
1 Regression	968.580	2	493.290	12.204	.000 ^b
Residual	1940.165	48	40.420		
Total	2926.745	50			

Sumber: Data Primer yang diolah di SPSS

- a. Dependen variabel: kualitas laporan keuangan .
- b. Predictors: (constant), sitem pengendalian intren, standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan pengolahan data, hasil uji F ditunjukkan pada tabel di atas, dimana nilai signifikan adalah 0,000, dan angka ini menunjukkan bahwa kurang dari 0,05, yang dapat menjelaskan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang mana artinya ada pengaruh simultan atau serentak pada variabel SAP (X1) dan SPIP (X2) berpengaruh positif terhadap KLIK (Y). SKPD Kota Palopo.

Pembahasan

Studi terhadap data olahan menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ untuk variabel SAP (X1). Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa H0 ditolak, H1 diterima, yang artinya variabel SAP berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penerapan SAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu atas

anggaran dan realisasinya. Selain itu, dengan mengimplementasikan SAP, informasi keuangan yang tersedia juga dapat dipercaya karena SAP dapat membantu meningkatkan pembukuan keuangan dari informasi tersebut. SAP kemudian juga dapat memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pengelolaan yang efektif, pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah.

Hasil kajian variabel SAP menunjukkan bahwa setiap SKPD menerapkan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita bisa melihat ini di setiap pengukuran variabel SAP yang kita lihat di pengukuran yang dijelaskan sebelumnya. Dari ketiga indikator yang digunakan terlihat bahwa SKPD terkait telah menerapkan prosedur sistem akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku, menerapkan sistem akuntansi SKPD, dan menyediakan perlengkapan yang memadai. Oleh karena itu sebagai faktor penyebab yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh standar akuntansi pemerintahan SAP.

Nilai signifikansi variabel SPIP sebesar $0,978 > 0,05$ menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel SPIP tidak berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Tujuan penerapan SPIP adalah untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang handal. Tujuan ini didasarkan pada premis utama bahwa informasi penting untuk pengambilan keputusan. Agar dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yang disajikan bersifat andal/terpercaya dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jika pelaporan yang disampaikan kurang memadai, maka dapat merugikan organisasi.

Varian SPIP berbasis studi ini menunjukkan bahwa kendala yang menyebabkan implementasi SPIP di SKPD terkait tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan pengukuran yang digunakan, pelaksanaan SPIP di SKPD menunjukkan bahwa beberapa SKPD tidak memenuhi struktur organisasi dan fungsi sebagaimana mestinya yang ada dalam sistem tripartit. Selain itu, masih ada pegawai yang mengabaikan keamanan aset organisasi dan dokumen penting karena tidak diketahui identitasnya sehingga merugikan kepentingan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dua elemen SPIP, lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian, tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku dapat menjadi penghambat pelaksanaan SPIP oleh SKPD dalam memaksimalkan penerapan SPIP. Karena itu, penerapan SPIP di SKPD belakangan tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Pemerintahan Daerah sebagai organisasi yang penting bagi kelangsungan hidup pegawai senantiasa perlu mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi dua kategori yaitu pengelolaan menyeluruh dan pengelolaan keuangan. Kegiatan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, agenda, ekspedisi, penyimpanan dokumen atau

pemberkasan penting, dan kegiatan pendokumentasian lainnya. Hakikat manajemen keuangan adalah pembukuan, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan sesuai dengan prinsip, standar, dan prosedur tertentu untuk memberikan informasi yang sebenarnya tentang bidang keuangan. Pengelolaan atau pembukuan keuangan jenis ini sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Sistem pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan yang cukup bagi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan administrasi negara, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan (Gustina, 2021), bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari efektivitas pengendalian internalnya, sehingga instansi pemerintah harus mampu melakukan Poin lainnya untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Selain itu (Politeknik et al., 2022) berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan karena beberapa kompetensi dan kuantitas SDM masih belum memenuhi kriteria seharusnya. Hal inilah yang membuat dampak SPIP di SKPD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Karena meskipun penerapan SPIP di SKPD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun masih ada ketidakpatuhan seperti pegawai yang melakukan rangkap tugas dan pengamanan aset secara fisik masih terabaikan.

Uji $F \leq 0,05$ dan $F \leq F$ tabel menghasilkan pengaruh positif terhadap akurasi laporan keuangan baik oleh sistem akuntansi pemerintahan maupun sistem pengendalian pemerintah. Berdasarkan pengelolaan data, tingkat signifikansi ini adalah 0,000 dan lebih besar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada beberapa SKPD Kota Palopo maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SAP berbasis akrual berdampak positif terhadap kualitas keuangan laporan perusahaan. dampak SAP akrual pada masing-masing SKPD terkait telah berjalan sesuai dengan PP No.1. Keputusan No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Penerapan Standar Akuntansi SAP berhasil melibatkan karyawan dalam pengalaman sistem dan prosedur yang digunakan. Oleh karena itu, penanggung jawab masing-masing SKPD terkait wajib melatih staf bagian keuangan agar penerapan SAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan SPIP tidak berdampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Pasalnya, meski penerapan SPIP di SKPD terkait sudah sesuai dengan undang-undang, namun masih ada beberapa kasus ketidakpatuhan seperti pegawai multi tasking dan pengamanan aset fisik yang masih terabaikan.

Variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah palopo. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari efektivitas pengendalian intern, sehingga aparatur pemerintah harus mampu melaksanakan tugas lainnya untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Area-area ini termasuk kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, pengungkapan yang memadai, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan.

Lampiran

Uji validitas.

Tabel 6. hasil uji validitas

		Instrumen	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengaruh standar akuntansi pemerintah (X1)		P01	0,279	0,752	Valid
		P02	0,279	0,722	Valid
		P03	0,279	0,760	Valid
		P04	0,279	0,703	Valid
		P05	0,279	0,648	Valid
		P06	0,279	0,688	Valid
		P07	0,279	0,454	Valid
		P08	0,279	0,758	Valid
		P09	0,279	0,759	Valid
		P10	0,279	0,701	Valid
Sistem pengendalian intren (X2)		P11	0,279	0,639	Valid
		P12	0,279	0 632	Valid
		P13	0,279	0,617	Valid
		P14	0,279	0,679	Valid
		P15	0,279	0,646	Valid
		P16	0,279	0,676	Valid
		P17	0,279	0,443	Valid
		P18	0,279	0,738	Valid
		P19	0,279	0,700	Valid
		P20	0,279	0,655	Valid
		P21	0,279	0,568	Valid

Kualitas laporan keuangan (Y)	P22	0,279	0,584	Valid
	P23	0,279	0,574	Valid
	P24	0,279	0,563	Valid
	P25	0,279	0,552	Valid
	P26	0,279	0,621	Valid
	P27	0,279	0,599	Valid
	P28	0,279	0,572	Valid
	P29	0,279	0,626	Valid
	P30	0,279	0,547	Valid

Sumber: Data primer yang diolah di SPSS

Daftar Pustaka

- Anita Sari, A. W. L. (2022). Analisis Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Kinerja Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara) Oleh: *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 59–66.
- Bogor, H. B. (2022). *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.bpk.go.id/news/ihps-ii-tahun-2021-memuat-hasil-pemeriksaan-tematik-atas-dua-prioritas-nasional>
- Bpkp. (2012). *No Title Indikator Dan Penilaian Efetifitas Penyelenggaraan Spip*. <https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/1682/12.0798-indikator-dan-penilaian-efektivitas-penyelenggaraan-spip>
- Dadang Suhendar, N. S. (2017). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 1(02), 90–105. <https://doi.org/10.25134/jrka.v1i02.442>
- Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia.*, 10(1), 56–64.
- Hasanah, S., Rumondang, T., & Siregar, S. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah , Sistem Informasi Akuntansi , Sistem Pengendalian Intern , Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

- Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Opd Di Kabupaten Labuhanbatu Pendahuluan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (Jakpi)*, 9.
- Ikhyanuddin, Miranda, P., Indrayani, & Nurhasanah. (2022). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(4), 498–509. <https://doi.org/10.54259/Akua.V1i4.1261>
- Ikriyati, T., & Aprilia, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.9.2.131-140>
- Kawedar, W. (2017). Implementasi Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaL Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum: Analisis Deskriptif Kualitatif. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Kusaeri, G., Elim, I., & Mawikere, L. M. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Lppm Bidang ...*, 5(2), 1173–1182. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/40270>
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/40270/36516>
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Emba*, 3(1), 1–8.
- Maulana, R. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 1, 12–27.
- Nyoman Triyadi. Rasmini. (2016). Pengaruh Sistem Berbasis AkruaL, Ti, Dan Spip Pada Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sdm Sebagai Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), 3475–3500.
- Otonomi, J., & Daerah, K. (2013). *08 Jurnal Otonomi Keu Daeah Vol 7 No 1 Thn 2019 Rosmery*.
- Politeknik, S. F., Bandung, N., & Bandung, P. N. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Skpd Kabupaten Bandung) Lili Indrawati. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02(03), 539–553.
- Puspita, D., Fadli, F., & Halimatusyadiah, H. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia,

- Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Seluma. *Jurnal Fairness*, 10(2), 79–88. <https://doi.org/10.33369/fairness.v10i2.15247>
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2), 8–17.
- Rewa, Zedly Zainal K. (2019). *Jumlah Skpd Di Pemkot Palopo*. <https://ujungpandangpos.com/jumlah-skpd-di-pemkot-palopo-disoroti-dinilai-tidak-efisien/>
- Safitri, E. N., & Zulkarnain, P. D. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 225–234. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.492>
- Suryo Triono, Septiani Depita Dewi. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. In *Jurnal Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>
- Yeni, E., Irman, M., & Fadrul, F. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Pekanbaru). *Research In Accounting Journal (Raj)*, 1(1), 64–88. <https://doi.org/10.37385/raj.v1i1.34>